

POLITICAL INSTITUTIONAL ECONOMY THEORY (HA-JOON CHANG)

Week 11

Institutional Economics

Dr. Rambu L.K.R. Nugrohowardhani, S.E.,M.A

Universitas Kristen Wira Wacana Sumba

Indonesia

SUB-CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Setelah mengikuti pertemuan hari ini maka mahasiswa dapat:

1. Memahami definisi dari ekonomi politik kelembagaan;
2. Memahami asumsi utama dari ekonomi politik kelembagaan menurut Ha-Joon Chang;
3. Memahami kasus-kasus yang dapat dijelaskan dengan teori ekonomi politik kelembagaan;
4. Memahami relevansi teori ekonomi politik kelembagaan di Indonesia

TOPIK HARI INI:

1. Definisi ekonomi politik kelembagaan dan contoh kasus di Indonesia;
2. Asumsi utama ekonomi politik kelembagaan;
3. Contoh kasus empirik di Indonesia;
4. Relevansi dalam konteks Indonesia

EKONOMI POLITIK KELEMBAGAAN?

“Pendekatan yang mempelajari bagaimana lembaga mempengaruhi perilaku ekonomi dan dinamika politik dalam suatu masyarakat. Pendekatan ini melihat bahwa pasar dan kegiatan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme ekonomi murni seperti penawaran dan permintaan, tetapi juga oleh struktur kekuasaan, aturan hukum, nilai-nilai sosial, serta peran pemerintah.”

Dalam perspektif ini, ekonomi dianggap sebagai hasil interaksi antara lembaga-lembaga sosial dan struktur politik, bukan sekadar kumpulan keputusan individu atau pasar bebas. Ekonomi politik kelembagaan mengkaji bagaimana kekuatan politik dan kelembagaan membentuk distribusi sumber daya, mengatur akses pasar, menentukan hak dan kewajiban pelaku ekonomi, serta mengatur legitimasi barang atau jasa yang diperdagangkan.

CONTOH:

Dalam ekonomi politik kelembagaan, kebijakan tentang kepemilikan tanah tidak hanya dilihat dari aspek pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh sejarah politik dan sosial, kekuasaan elite lokal, serta norma budaya yang terkait tanah dan properti. Lembaga seperti hukum pertanahan, tradisi masyarakat adat, dan peraturan pemerintah berperan dalam menentukan siapa yang berhak memiliki atau mengakses tanah tersebut.

ASUMSI UTAMA EPK (HA-JOON CHANG)

1. Ekonomi adalah proses sosial dan politik
2. Pasar dipengaruhi oleh kekuasaan dan politik
3. Lembaga berperan signifikan
4. Ekonomi tidak selalu rasional

#1

EKONOMI ADALAH PROSES SOSIAL DAN POLITIK

“Dalam perspektif ini ekonomi dianggap sebagai hasil dari interaksi antaraktor sosial (individu, perusahaan, pemerintah) yang masing-masing dipengaruhi oleh kepentingan, kekuasaan, dan posisi mereka dalam masyarakat. Lembaga-lembaga sosial, baik formal (seperti hukum dan regulasi) maupun informal (seperti norma dan nilai budaya), memainkan peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi dan proses pasar”

CONTOH KASUS:

- Kebijakan subsidi pupuk di Indonesia.

Kebijakan ini bukan hanya keputusan ekonomi murni yang didasarkan pada efisiensi pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan sosial dan politik.

- **Pertimbangan politik:** Subsidi pupuk sering kali dilakukan karena kepentingan politik, khususnya untuk memperoleh dukungan dari kelompok petani. Di Indonesia, petani merupakan salah satu kelompok pemilih yang signifikan, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, subsidi pupuk menjadi kebijakan yang dianggap strategis untuk memenangkan dukungan politik dari kalangan petani.

- **Tujuan sosial:** Pemerintah memberikan subsidi ini untuk membantu petani kecil agar tetap produktif dan dapat bersaing di pasar. Subsidi ini berfungsi sebagai bentuk dukungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi ketimpangan ekonomi antara petani besar dan kecil, karena petani kecil sering kali berada dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil
- **Dampak ekonomi yang lebih luas:** Subsidi pupuk akan menciptakan ketergantungan yang menyebabkan harga pupuk menjadi sangat terpengaruh oleh kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial seperti kebutuhan kesejahteraan masyarakat petani, serta keputusan politik untuk mempertahankan stabilitas sosial di daerah pedesaan.

“Kasus subsidi pupuk ini memperlihatkan bahwa seringkali kebijakan ekonomi bukan hanya hasil dari analisis biaya-manfaat, tetapi juga didorong oleh kepentingan politik untuk menjaga stabilitas sosial dan dukungan politik. Dalam hal ini, keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintah merupakan hasil dari proses sosial dan politik yang kompleks, di mana ekonomi, politik, dan kesejahteraan masyarakat saling terkait.”

#2

PASAR DIPENGARUHI OLEH KEKUASAAN DAN POLITIK

“Pasar tidak hanya dikendalikan oleh hukum ekonomi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh distribusi kekuasaan dan proses politik. Kekuasaan dan politik menentukan aturan main dalam pasar, mempengaruhi siapa yang dapat berpartisipasi, serta mengatur cara transaksi berlangsung dan siapa yang mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, pasar mencerminkan dan dipengaruhi oleh kepentingan dan keputusan para aktor berpengaruh, seperti pemerintah, perusahaan besar, atau kelompok elite lainnya, yang membentuk struktur dan aturan pasar sesuai dengan kepentingan mereka”

CONTOH KASUS:

- Dominasi perusahaan tertentu dalam industri minyak dan gas (migas).
- **Pengaruh kekuasaan negara:** Di Indonesia, sektor migas sangat diatur oleh pemerintah karena dianggap sebagai sektor strategis yang berdampak besar pada perekonomian nasional. Pemerintah memberikan hak khusus kepada perusahaan-perusahaan tertentu, terutama yang dimiliki negara (BUMN), untuk mengelola sumber daya migas. Pertamina, misalnya, memegang posisi dominan sebagai satu-satunya BUMN yang diberi kewenangan besar dalam distribusi dan pengolahan minyak, sehingga mampu mendominasi pasar migas di Indonesia.

- **Pengaruh politik dalam kebijakan harga:**

Harga bahan bakar minyak (BBM) sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik, bukan hanya oleh mekanisme pasar global. Pada periode tertentu, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengontrol harga BBM agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas, meskipun harga minyak mentah global sedang tinggi. Kebijakan ini didorong oleh pertimbangan politik untuk menjaga stabilitas sosial dan menghindari gejolak publik akibat kenaikan harga BBM. Namun, subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah juga sangat besar, sehingga menimbulkan beban anggaran negara.

▪ Pengaruh elite dan lobi:

Selain pemerintah, perusahaan swasta besar yang memiliki modal dan pengaruh besar sering kali melakukan lobi politik untuk mempengaruhi regulasi di sektor migas. Misalnya, perusahaan asing yang bergerak di sektor migas mungkin melakukan lobi untuk mendapatkan izin eksplorasi atau konsesi di wilayah tertentu. Proses ini sering kali tidak hanya terkait dengan efisiensi ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan mereka dalam melakukan lobi politik dan mempertahankan kekuasaan mereka di sektor tersebut.

“Kasus industri migas di Indonesia menunjukkan bahwa pasar migas tidak hanya diatur oleh prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga oleh keputusan politik dan kekuasaan pemerintah serta elite bisnis.

Pengaturan harga BBM oleh pemerintah adalah contoh konkret bagaimana keputusan politik bisa memengaruhi pasar, sementara dominasi perusahaan tertentu menunjukkan bagaimana kekuasaan memainkan peran dalam menentukan akses dan kendali atas pasar. Hal ini menggarisbawahi bahwa pasar tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh struktur kekuasaan dan kepentingan politik yang ada.”

#3

LEMBAGA BERPERAN SIGNIFIKAN

“Lembaga, baik formal (misalnya, hukum, peraturan, dan kebijakan) maupun informal (misalnya, norma sosial dan budaya), memiliki peran penting dalam mengatur dan mempengaruhi aktivitas ekonomi. Dalam perspektif ini, lembaga dilihat sebagai struktur yang menciptakan aturan main dalam masyarakat, membentuk perilaku ekonomi, dan menciptakan kerangka bagi individu atau perusahaan untuk berinteraksi secara ekonomi. Tanpa lembaga yang efektif, pasar dan kegiatan ekonomi cenderung menjadi tidak teratur atau bahkan kacau.”

“Lembaga juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas, mengurangi ketidakpastian, dan mengatur interaksi antaraktor dalam pasar. Lembaga yang kuat dan dapat diandalkan membantu memastikan bahwa transaksi ekonomi berjalan secara adil, efisien, dan transparan, sementara kelemahan lembaga dapat menyebabkan distorsi pasar, ketidakadilan, dan bahkan konflik.”

CONTOH KASUS:

➤ Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

▪ **Pengawasan dan Regulasi:**

OJK berfungsi sebagai pengawas industri keuangan, termasuk perbankan, asuransi, dan pasar modal. Dengan adanya regulasi dari OJK, pelaku di sektor keuangan harus mengikuti standar tertentu, sehingga mengurangi risiko penipuan, manipulasi, dan kebangkrutan yang dapat merugikan masyarakat luas. Contoh nyata adalah regulasi tentang permodalan minimum bagi bank, yang bertujuan untuk memastikan bank memiliki ketahanan keuangan dan tidak mudah bangkrut.

▪ **Perlindungan Konsumen:**

OJK juga memiliki mandat untuk melindungi konsumen dalam sektor keuangan. Ini mencakup, misalnya, kewajiban perusahaan asuransi untuk transparan dalam memberikan informasi mengenai produk asuransi. Selain itu, OJK dapat memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar hak konsumen, seperti dalam kasus investasi bodong yang merugikan masyarakat. Keberadaan OJK membantu konsumen merasa lebih aman dan percaya dalam bertransaksi di sektor keuangan.

▪ **Stabilitas Keuangan:**

OJK memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan Indonesia. Misalnya, selama krisis ekonomi, OJK dapat mengeluarkan kebijakan untuk mendukung perbankan dan mencegah kepanikan di kalangan nasabah. Hal ini dilakukan agar sistem keuangan tetap stabil dan tidak terganggu oleh ketidakpastian ekonomi yang lebih luas. Pada masa pandemi COVID-19, OJK menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk membantu perusahaan dan individu yang terdampak secara finansial, sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga.

“Kasus OJK di Indonesia menunjukkan bagaimana lembaga memainkan peran penting dalam memastikan stabilitas dan transparansi di sektor ekonomi. Tanpa OJK, sektor keuangan mungkin akan lebih rawan terhadap manipulasi dan ketidakstabilan, sehingga mengancam kepercayaan masyarakat. Lembaga seperti OJK membantu menciptakan struktur aturan yang mendukung berjalannya transaksi keuangan yang sehat dan adil, menunjukkan bahwa keberadaan lembaga sangat penting dalam ekonomi politik kelembagaan.”

#4

EKONOMI TIDAK SELALU RASIONAL

“Keputusan ekonomi tidak selalu didasarkan pada perhitungan logis atau optimalisasi keuntungan seperti yang diasumsikan dalam teori ekonomi neoklasik. Dalam perspektif ini, perilaku ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, budaya, emosi, dan norma-norma tertentu yang mungkin tidak “rasional” dari sudut pandang ekonomi murni. Para pelaku ekonomi seringkali mengambil keputusan berdasarkan intuisi, tekanan sosial, tradisi, atau bahkan preferensi pribadi yang tidak selaras dengan logika ekonomi standar.”

CONTOH KASUS:

- Konsumsi Berlebihan Selama Diskon Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) tanggal 12 Desember di Indonesia
- **Belanja bukan kebutuhan:** Banyak konsumen membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan hanya karena tergiur diskon besar. Keputusan untuk membeli barang yang kurang penting ini sering kali tidak berdasarkan pada kebutuhan atau kemampuan finansial yang sesungguhnya, tetapi lebih pada dorongan untuk memanfaatkan kesempatan "harga murah." Ini adalah contoh perilaku yang tidak rasional karena keputusan belanja lebih dipengaruhi oleh promosi ketimbang kebutuhan nyata.

▪ **Efek Psikologis Diskon dan Batasan Waktu:**

E-commerce sering kali menggunakan strategi batasan waktu untuk menarik pembeli, seperti “diskon hanya untuk 12 jam” atau “penawaran *flash sale*.” Strategi ini membuat konsumen merasa perlu segera mengambil keputusan untuk menghindari kehilangan kesempatan. Pengaruh batasan waktu ini memicu efek psikologis urgensi yang mendorong mereka membeli barang lebih cepat tanpa mempertimbangkan apakah barang tersebut benar-benar diperlukan.

▪ **Perilaku Impulsif karena FOMO (Fear of Missing Out):**

Selama Harbolnas, banyak orang merasa takut ketinggalan momen belanja murah (*fear of missing out* atau FOMO). Mereka membeli berbagai barang hanya untuk merasa "tidak tertinggal" dari yang lain, padahal belum tentu barang tersebut akan digunakan atau memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Kasus Harbolnas di Indonesia memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi tidak selalu rasional. Keputusan untuk berbelanja sering kali didorong oleh faktor-faktor psikologis seperti dorongan untuk memanfaatkan diskon, batasan waktu, atau ketakutan akan ketinggalan (FOMO). Dalam banyak kasus, masyarakat membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan, menunjukkan bahwa perilaku ekonomi mereka jauh dari logika rasional dan lebih dipengaruhi oleh strategi pemasaran dan faktor emosional.

RELEVANSI DALAM KONTKES INDONESIA?

“Perspektif dan teori ekonomi politik kelembagaan sangat relevan untuk memahami dinamika ekonomi di Indonesia karena pendekatan ini mengakui bahwa keputusan ekonomi tidak terjadi dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuasaan politik, aturan, serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.”

KESIMPULAN

- 1) EPK membantu memahami peran negara dalam perekonomian: mengapa dan bagaimana intervensi negara diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
- 2) EPK membantu menganalisis konflik kepentingan dan dampaknya pada ekonomi nasional: mengakui adanya kompleksitas kebijakan ekonomi dan dampaknya

- 3) EPK menjelaskan keberlanjutan kelembagaan lokal dan tradisi ekonomi: memungkinkan untuk melihat bahwa bentuk-bentuk ekonomi lokal ini bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang kuat.
- 4) EPK memahami ketimpangan ekonomi dan sosial: memungkinkan untuk memahami bagaimana kebijakan, kelembagaan, dan relasi kekuasaan mempengaruhi distribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya di berbagai wilayah Indonesia.
- 5) EPK dapat mendorong kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan: mendukung pendekatan ekonomi yang inklusif dengan memperhitungkan kepentingan berbagai kelompok sosial

REFERENSI

Campbell, J.L. (1997) Recent Trends in Institutional Political Economy,, International Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 17 No. 7/8, pp. 15-56.
<https://doi.org/10.1108/eb013316>

Datta, A., Jones, H., Febriany, V., Harris, D., Dewi, R.K., Wild, L., Young J. (2011) The political economy of policy-making in Indonesia : Opportunities for improving the demand for and use of knowledge, Working Paper 340, Results of ODI research presented in preliminary form for discussion and critical comment, Overseas Development Institute, London

Ford, Kirsten (2011) The Veblenian Roots of Institutional Political Economy: From Veblen to Chang in Institutional Economics, Working Paper No: 2011-07, Department of Economics, University of Utah.